

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**Devi Apriani**

Tinjauan hukum pidana terhadap organisasi pengelola zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung dan mengeksplorasi peran hukum pidana dalam konteks organisasi di kota bandar lampung. Bahwa organisasi pengelola zakat tanpa izin di Kota Bandar Lampung memiliki potensi pelanggaran hukum pidana. Terdapat ketidakjelasan sanksi yang diterapkan terhadap praktik ilegal tersebut, serta kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih proaktif dan efektif. Penelitian juga mendalami tentang peran hukum pidana dalam menanggulangi organisasi pengelola zakat tanpa izin, termasuk upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif empiris dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan dalam ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tanpa izin, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta, khususnya Badan Amil Zakat Nasional. Disarankan adanya edukasi masyarakat terkait risiko pengelolaan zakat tanpa izin, serta penguatan regulasi guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur dalam praktik pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran hukum pidana dalam menanggulangi organisasi pengelola zakat tanpa izin di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan perlindungan masyarakat yang lebih baik

**Kata Kunci : Zakat, Pengelolaan , Ilegal**

**ABSTRACT****CRIMINAL LAW REVIEW ON UNLICENSED ZAKAT MANAGEMENT  
ORGANIZATION IN BANDAR LAMPUNG****By:****Devi Apriani**

*Review of criminal law against unlicensed zakat management organizations in Bandar Lampung City and explore the role of criminal law in the context of organizations in Bandar Lampung City. That the organization of zakat management without a permit in Bandar Lampung City has the potential to violate criminal law. There is a lack of clarity on the sanctions applied against such illegal practices, as well as the need for more proactive and effective law enforcement. The research also explores the role of criminal law in tackling unlicensed zakat management organizations, including prevention, law enforcement, and protection efforts for the communities involved. The research method used is empirical normative legal analysis with a focus on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and other related regulations. The results showed the need for improvements in criminal law provisions relating to the management of zakat without permits, as well as increased cooperation between the government and private institutions, especially the National Amil Zakat Agency. It is recommended to educate the public regarding the risks of unlicensed zakat management, as well as strengthening regulations to create a safer and more orderly environment in zakat management practices in Bandar Lampung City. This research contributes to the understanding of the role of criminal law in tackling unlicensed zakat management organizations at the local level, in the hope that it can provide a foundation for policy improvement and better community protection*

**Keywords: Zakat, Management, Illegal**